

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bagian pendahuluan ini disajikan secara berturut-turut tentang: (a) latar belakang penelitian; (b) identifikasi masalah penelitian; (c) rumusan masalah penelitian; (d) tujuan penelitian; (e) manfaat atau signifikansi penelitian; dan (f) struktur organisasi disertasi. Uraian secara detail dari masing-masing bagian, sebagai berikut.

A. Latar Belakang Penelitian

Gejala modernisasi dan globalisasi dewasa ini telah merambah ke seluruh pelosok dunia. Masyarakat dan kebudayaan di Indonesia tidak luput dari pengaruh liberalisme global tersebut. Gejala masyarakat dengan banyak masuknya nilai-nilai asing karena proses globalisasi dan menguatnya primordialisme menimbulkan berbagai benturan nilai-nilai dan kepentingan dalam masyarakat (Tilaar, 1999). Hal ini berdampak pada munculnya berbagai permasalahan, seperti: (1) terjadinya disorientasi nilai-nilai Pancasila sebagai filosofi dan ideologi bangsa; (2) bergesernya nilai-nilai etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; (3) memudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa; (4) ancaman disintegrasi bangsa; dan (5) melemahnya kemandirian bangsa (Pemerintah Republik Indonesia, 2010a: 16-19).

Bali, juga tidak terlepas dari pengaruh globalisasi dan primordial tersebut. Banyak nilai-nilai budaya asli daerah Bali yang telah terkontaminasi oleh nilai-nilai asing, sehingga nilai budaya asli semakin kabur. Kalangan pakar budaya berpendapat bahwa masyarakat Bali dewasa ini sedang mengalami masa transisi budaya sebagai dampak eksternal dari pengembangan industri pariwisata, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Beratha, 1993). Bagi masyarakat Bali, yang terpenting adalah bagaimana menjaga kelestarian budaya Bali, sehingga tidak pudar akibat globalisasi. Dalam kaitan ini masyarakat Bali menaruh harapan

kepada lembaga pendidikan, khususnya pendidikan formal sebagai garda terdepan dalam menjaga kelestarian budaya Bali.

Berbagai permasalahan sebagaimana yang dipaparkan di atas, merupakan gambaran realita kehidupan yang menunjukkan masih lemahnya karakter kebangsaan masyarakat Indonesia. Kondisi ini tampak dari adanya berbagai penyimpangan sosial, seperti: korupsi, kekerasan, kejahatan seksual, tawuran di kalangan siswa dan mahasiswa, perkelahian masal, kehidupan ekonomi yang konsumtif, kehidupan politik yang tidak produktif, penyalahgunaan narkoba, melemahnya nilai-nilai kebersamaan dan gotong-royong, melemahnya sopan santun dan budi pekerti, dan masih banyak permasalahan sosial lainnya. Kenyataan tersebut tidak saja terjadi di kalangan masyarakat awam di tingkat akar rumput, tetapi juga sudah merambah pada kalangan profesional, tokoh masyarakat, para pendidik, elit politik, bahkan hingga para pemuka/tokoh agama, pemimpin bangsa dan negara (Kemendiknas, 2010).

Kondisi-kondisi seperti di atas, oleh Thomas Lickona (1992) dikatakan sebagai indikator kehancuran suatu bangsa. Menurutnya, kehancuran suatu bangsa dikarenakan oleh perilaku manusia (individu, kelompok dan masyarakat) dari suatu bangsa yang ditandai dengan meningkatnya budaya kekerasan, ketidakjujuran yang membudaya, semakin tingginya rasa tidak hormat kepada sesamanya, melemahnya kohesi sosial, pengaruh *peer group* terhadap tindakan kekerasan, meningkatnya kecurigaan dan kebencian, penggunaan bahasa yang memburuk, penurunan etos kerja, menurunnya rasa tanggungjawab individu dan warga negara, meningkatnya perilaku merusak diri, dan semakin kaburnya pedoman moral. Brooks dan Goble dalam buku "*The Case for Character Education*" (1997), menyebutkan bahwa gelombang proses melemahnya karakter suatu komunitas, berhubungan erat dengan melemahnya standar moral dalam masyarakat.

Diduga kuat hal tersebut disebabkan oleh dominasi dan hegemoni praktik pendidikan nasional yang cenderung mengabaikan nilai-nilai humanisme-religius,

sehingga roh pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai moral yang suci kian waktu semakin cenderung menampakkan gejala sekularisasi (Widja, 2001:74-87). Praktik pendidikan seperti itu, ditengarai akan menjauhkan dunia pendidikan dari tujuan pembentukan manusia Indonesia seutuhnya, dan makin menggelincirkan generasi masa depan bangsa Indonesia ke arah pengambilan tindakan pragmatis yang dibawa oleh faham dunia sekuler, cenderung memisahkan antara kepentingan ideologi agama dan ideologi ilmu pengetahuan (Kaelan, 2003; Hadis, 2006).

Kelemahan dalam praktik pendidikan di Indonesia selama ini terjadi, ketika pendidikan karakter dipersepsi dalam pemahaman yang tidak *integrated* pada setiap mata pelajaran dan kurikulum sekolah. Sementara itu, dalam pembelajaran terjadi proses yang lebih menekankan pada pemberian pengetahuan (*transfer of knowledge*) dibandingkan dengan kegiatan yang memungkinkan terjadinya internalisasi nilai (Pasandaran, 2010). Praktik pendidikan yang demikian itu, juga tampak dalam pembelajaran IPS yang menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya cenderung hanya melibatkan aktivitas kognisi tingkat rendah yang kering dari aktivitas-aktivitas mental yang berdimensi moralitas. Lebih lanjut dikatakan bahwa, pembelajaran IPS hanya mampu membuat siswa pintar menghafal fakta-fakta, konsep, dan peristiwa, tetapi kering dan tidak bermakna (Budimansyah dan Sapriya, 2012; Sukadi dan Kertih, 2007; Supriatna, 2011; Suwarma, 2001).

Situasi dan kondisi bangsa yang memprihatinkan tersebut, mendorong pemerintah Indonesia mengambil inisiatif untuk memprioritaskan pembangunan karakter bangsa sebagai arus utama pembangunan nasional. Dengan demikian, diharapkan akan terwujud kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan dasar dan ideologi, konstitusi, haluan negara, serta potensi kolektifnya dalam konteks kehidupan nasional, regional, dan global (Pemerintah Republik Indonesia, 2010a: 5-7). Gagasan tentang pentingnya pembangunan karakter bangsa, sesungguhnya telah lama dikumandangkan oleh para pendiri bangsa. Ir. Sukarno,

presiden pertama NKRI adalah salah seorang dari sekian banyak tokoh di Indonesia yang menggagas pentingnya membangun karakter bangsa dalam konsep “*Nation and character building*”. Sayangnya, ide mulia untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang beradab dan bermartabat sebagaimana yang digagas oleh para pendiri bangsa, hingga saat ini tampaknya masih jauh panggang dari api (jauh dari harapan). Hal ini menunjukkan bahwa berbagai upaya yang dilakukan dalam usaha membangun karakter bangsa selama ini kurang, bahkan dapat dikatakan tidak efektif. Dunia pendidikan, termasuk pendidikan formal di sekolah pun dianggap gagal melaksanakan fungsi utama pendidikan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), yakni: "mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa" (Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2003).

Dalam kondisi yang demikian itu, muncullah kesadaran dan komitmen masyarakat dari berbagai kalangan, mulai dari para pakar pendidikan, birokrasi, praktisi, hingga masyarakat umum tentang pentingnya pendidikan budaya dan karakter bangsa diprioritaskan dan dimantapkan pelaksanaannya pada semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan di seluruh Indonesia (Kemendiknas, 2010:2). Pengejawantahan komitmen tersebut secara kolektif telah dinyatakan sebagai kesepakatan nasional pada serasehan nasional pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa, tanggal 14 Januari 2010, sebagai berikut: (1) Pendidikan budaya dan karakter bangsa merupakan bagian integral yang tak terpisahkan dari pendidikan nasional secara utuh; (2) Pendidikan budaya dan karakter bangsa harus dikembangkan secara korehensif sebagai proses pembudayaan; (3) Pendidikan budaya dan karakter bangsa merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, sekolah dan orang tua; (4) Dalam upaya merevitalisasi pendidikan budaya dan karakter bangsa, diperlukan gerakan nasional (Winataputra, 2010: 7-8).

Pentingnya pendidikan budaya dan karakter bangsa diprioritaskan dan

dimantapkan dalam bingkai sistem pendidikan nasional, mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. Pencanangan program Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa oleh Pemerintah c/q Presiden RI, Susilo Bambang Yudoyono pada Peringatan Hardiknas 2 Mei 2010, merupakan wujud nyata perhatian dan kepedulian pemerintah tersebut. Mohammad Nuh, Menteri Pendidikan Nasional ketika memberikan sambutan pada Hari Pendidikan Nasional, 2 Mei 2010 yang bertema "Pendidikan Karakter untuk Membangun Peradaban Bangsa", menegaskan bahwa pembangunan karakter dan pendidikan karakter menjadi suatu keharusan, karena pendidikan tidak hanya menjadikan peserta didik menjadi cerdas, tetapi juga mempunyai budi pekerti dan sopan santun, sehingga keberadaannya sebagai anggota masyarakat menjadi bermakna baik bagi dirinya maupun masyarakat pada umumnya.

Sebagai bagian integral dalam kurikulum pendidikan di lembaga pendidikan formal, Pendidikan IPS tentunya juga bertanggung jawab untuk melaksanakan pendidikan karakter dalam rangka memajukan peradaban bangsa Indonesia yang bermartabat dan untuk keutuhan NKRI. Untuk itu, Pendidikan IPS mestilah menjadi studi integratif yang dapat memberdayakan seluruh potensi peserta didik agar memiliki kapabilitas untuk mengatasi masalah kehidupan manusia dalam berbagai dimensi ruang, waktu, aktivitas, dan nilai-nilai di lingkungannya (Hasan, 2010:2). Pendidikan IPS sesuai dengan hakikatnya sebagai studi integratif dari ilmu-ilmu sosial, humaniora, agama, dan budaya, haruslah mampu mengantarkan peserta didik mencapai kebenaran dan juga kebahagiaan hidup, menghasilkan warga negara yang baik, memiliki pengetahuan yang kuat, dan mampu memimpin kehidupan yang bermakna (Somantri, 2001).

Masalahnya, pembelajaran IPS di sekolah selama ini yang lebih berorientasi pada penguasaan materi pelajaran tentu tidaklah memungkinkan bagi guru untuk mengintegrasikan misi pendidikan karakter dan nilai budaya bangsa secara optimal. Ada dua kendala yang dihadapi guru-guru di sekolah. *Pertama*, kurikulum sekolah, khususnya mata pelajaran IPS, dalam mengembangkan

konsep *nation and character building*nya lebih didominasi oleh konsep nasionalisme Negara (lihat Widja, 1993). Dalam konsep ini, nasionalisme lebih dipandang sebagai *unity*, yaitu kesatuan yang tunggal dari kekuasaan Negara, sehingga nasionalisme harus dipandang benar dari definisi kekuasaan. Secara ideologi dan hegemoni, nasionalisme Indonesia dianggap sebagai wacana tunggal kekuasaan Negara yang harus bisa diterima semua golongan walaupun mereka sesungguhnya memiliki latar belakang multikultur. Dalam kurikulum IPS, wacana ini memunculkan pelajaran IPS yang seragam bagi seluruh siswa di Indonesia yang memiliki keragaman budaya. Makna nasionalisme dianggap seakan-akan satu perspektif tentang keIndonesiaan yang tunggal, bukan sebagai keIndonesiaan yang beragam budayanya. Jika benar lingkungan sosial turut mewarnai cara pandang manusia tentang dunianya (Pai, 1990), maka konsep nasionalisme negara yang diintervensikan ke dalam kurikulum akan menjadi kendala bagi guru dalam membangun karakter dan nilai budaya bangsa yang bersifat pluralistik dan multikultur. *Kedua*, kurikulum IPS yang masih merupakan konsep social sciences education, dan kurang bermakna sebagai social studies, menyulitkan guru untuk mengintegrasikan misi pendidikan karakter dan nilai budaya bangsa. Hal ini karena nilai-nilai keilmuan yang melandasi kurikulum IPS yang berorientasi pada penguasaan materi keilmuan bidang studi cenderung juga bersifat tunggal, dan kurang menghargai nilai-nilai budaya masyarakat yang pluralistik dan multikultur yang riil hidup di tengah-tengah lingkungan siswa.

Untuk bisa melakukan integrasi pendidikan karakter dan nilai budaya bangsa ke dalam pembelajaran IPS di sekolah, tentu diperlukan upaya merekonstruksi kebijakan dan implementasi praktik Pendidikan IPS di sekolah. Dalam kaitan dengan upaya tersebut, perlu dimulai dari merekonstruksi konteks input (kebijakan dan lingkungan sosial sekolah), proses pendidikan, dan hasil belajar siswa dalam pendidikan IPS. Inilah sesungguhnya alasan utama penelitian ini dilakukan menjadi sebuah upaya merekonstruksi program Pendidikan IPS di sekolah dalam rangka Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa berbasis kearifan

local masyarakat. Hal ini senada dengan pandangan kaum rekonstruksionis, yang mengatakan, sebagai berikut.

Sekolah semestinya diabdikan kepada pencapaian tatanan demokratis yang mendunia. Secara filosofis, seorang rekonstruksionis yakin bahwa teori pada puncaknya tak terpisahkan dari latar belakang sosial dalam suatu era kesejarahan tertentu. Pikiran, dengan begitu, adalah sebuah keluaran atau produk dari kehidupan di sebuah masyarakat tertentu di suatu waktu (O'neil, 2001:23).

Berpegang pada fakta, fenomena, serta asumsi-asumsi sebagaimana yang diuraikan di atas, dan belajar dari kelemahan-kelemahan pelaksanaan program pendidikan karakter bangsa selama ini, maka penelitian ini penting dilakukan. Hal ini dilandasi atas sejumlah alasan dan pertimbangan, sebagai berikut.

Pertama, sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, peneliti merasakan kerisauan yang amat mendalam, ke mana arah yang akan dituju oleh perubahan sosial budaya masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Bali. Hal ini terutama setelah melihat perkembangan program-program pendidikan sekolah yang tampak tidak relevan lagi dengan karakteristik kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Bali yang religius, hidup dengan solidaritas sosial yang tinggi, kreatif dan sangat menghargai kesenian, ramah dan sangat terbuka dan toleran tetapi juga cerdas terhadap masyarakat dan kebudayaan lain yang masuk ke Bali, menghargai dan melestarikan lingkungan, cinta hidup damai, bekerja selalu dilandasi sikap *yadnya*, bekerja dengan semangat *jengah* dan *metaksu*, serta selalu mengejar keseimbangan kehidupan lahir dan bathin dan kesejahteraan *sekala* dan *niskala*. Karakteristik seperti ini sudah mulai tampak kontras terjadi pada berbagai lingkungan sekolah di Bali, yang pola-pola pendidikannya sudah mengarah kepada pendidikan sosial budaya modern yang lebih berorientasi kepada kepentingan orientasi nilai-nilai nasional dan global dengan mengabaikan usaha-usaha pelestarian nilai-nilai sosial budaya dan agama Hindu yang fundamental.

Kedua, kajian ini sejalan dengan upaya-upaya reformasi serta inovasi

pendidikan di sekolah pada umumnya, dan Pendidikan IPS pada khususnya yang menekankan pada prioritas pendidikan budaya dan karakter bangsa. Sebagai kebijakan yang relatif baru dalam sistem pendidikan di Indonesia, tentulah diperlukan model-model pendekatan terbaik pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa agar pelaksanaannya menjadi efektif dan berdayaguna. Kajian ini sangat penting dilakukan agar dapat ditemukan strategi pendidikan dan pembelajaran nilai-nilai budaya dan karakter bangsa dalam rangka membangun kualitas perilaku kolektif kebangsaan yang unik-baik yang tercermin dalam kesadaran, pemahaman, rasa, karsa, dan perilaku berbangsa dan bernegara dari hasil olah pikir, olah hati, olah rasa dan karsa, serta olah raga seseorang dalam kehidupan kelompok berbangsa yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, keberagaman dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen terhadap NKRI. Dengan demikian, diharapkan akan terwujud kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan dasar dan ideologi, konstitusi, haluan negara, serta potensi kolektifnya dalam konteks kehidupan nasional, regional, dan global yang berkeadaban (Pemerintah Republik Indonesia, 2010: 5-7).

Ketiga, Sekolah Menengah Pertama (SMP) dijadikan sebagai lokasi atau subjek sasaran penelitian, karena pada jenjang ini permasalahan nilai-nilai dan moral sebagai inti dari pendidikan karakter merupakan persoalan yang krusial. Hal ini disebabkan oleh siswa pada jenjang SMP, menurut teori psikologi perkembangan, berada pada tahap transisi dari masa anak-anak menuju masa remaja/dewasa. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa terjadinya pelanggaran-pelanggaran moral, pelanggaran disiplin, perilaku menyimpang, seperti: membolos, nyontek, merokok, bahkan tawuran dan sejenisnya sering terjadi pada siswa SMP. Bunyamin Maftuh dalam bukunya: “Bunga rampai Pendidikan Umum dan Pendidikan Nilai” (2009: 92-93) mengemukakan hasil penelitiannya tentang perkembangan moral siswa SLTP, yang secara umum berada pada tingkat “orientasi menjadi anak baik” atau “moralitas kerja sama antar pribadi”, yang termasuk dalam tahap konvensional. Ini berarti bahwa sekolah sangat perlu

menciptakan suasana sekolah yang dapat memfasilitasi terjadinya pembiasaan untuk menguatkan karakter kerjasama antar pribadi tersebut di sekolah. Bagaimana sekolah membangun suasana yang demikian itu, penting untuk dikaji secara lebih mendalam melalui penelitian ilmiah.

Keempat, kajian tentang Pendidikan IPS dalam wacana pendidikan budaya dan karakter bangsa penting dilakukan, karena sebagai bagian integral dalam kurikulum persekolahan, dan sesuai misinya sebagai program pendidikan sosial di sekolah, mata pelajaran IPS tentulah memiliki tanggung jawab dalam pengembangan program pendidikan budaya dan karakter bangsa. Sementara itu, pelaksanaan program Pendidikan IPS di sekolah, khususnya pada jenjang SMP, masih dihadapkan pada sejumlah permasalahan/kendala, baik internal maupun eksternal. Secara internal, IPS masih dihadapkan pada persoalan jati diri dan statusnya dalam kurikulum persekolahan. Sampai saat ini di antara para ahli/pakar IPS maupun praktisi belum semuanya memiliki pandangan yang sama, terutama tentang jati diri IPS itu sendiri.

Masalah eksternal dan sekaligus juga internal Pendidikan IPS adalah terkait dengan statusnya dalam kurikulum, khususnya pada jenjang SMP/MTs. Sejak diberlakukannya kebijakan Kurikulum 2006 atau yang lazim disebut Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), secara yuridis (*de jure*) status Pendidikan IPS diposisikan sebagai program pendidikan terpadu. Para ahli Pendidikan IPS pun kebanyakan sepakat mengenai hal itu. Diantaranya, Sapriya (2009) mengatakan mata pelajaran IPS di SMP lebih cocok diberikan dengan pendekatan terpadu, karena sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Namun, dalam kenyataannya di lapangan belum bisa sepenuhnya mewujudkan gagasan tentang IPS terpadu tersebut. Banyak faktor yang diduga menjadi penyebabnya. Diantaranya, belum adanya guru yang benar-benar berlatar belakang Pendidikan IPS. Masalah kekurangan jam mengajar jika pembelajaran dilakukan secara ber-tim karena tuntutan sertifikasi, dan sebagainya. Adanya permasalahan tersebut menjadikan penelitian ini penting dilakukan, agar diperoleh gambaran tentang status

Pendidikan IPS dalam kurikulum sekolah, serta peran dan kontribusinya dalam konteks pembangunan karakter bangsa di sekolah.

Kelima, kajian tentang kearifan budaya lokal penting dilakukan, disebabkan oleh keberadaannya masih tetap diperlukan, baik oleh dunia pendidikan maupun oleh masyarakat. Bagi masyarakat Bali, nilai-nilai kearifan budaya lokal dapat dijadikan sebagai landasan untuk mengatur keseimbangan hidup dalam masyarakat. Karena itu, masyarakat memiliki harapan pada lembaga pendidikan untuk dapat berperan dalam proses pelestarian nilai-nilai budaya lokal agar eksistensinya tetap terjaga. Satu-satunya institusi yang masih bisa berperan untuk menyelamatkan potensi kearifan lokal dan menjadikannya sebagai kekuatan modal sosial untuk meningkatkan daya saing bangsa hanyalah lembaga pendidikan (Abdullah, 2008; Fukuyama; 1985).

Kajian tentang kearifan lokal ini juga penting dilakukan, karena masih terbatasnya gagasan-gagasan yang mengembangkan kearifan-kearifan budaya lokal dalam penyelenggaraan pendidikan sekolah, khususnya dalam pembelajaran IPS. Hal ini penting, karena selama ini pembelajaran IPS di sekolah dianggap kurang menarik bagi siswa, tidak kontekstual, dan kurang berbasis konteks sosial dan budaya masyarakat. Beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya menemukan bahwa pembelajaran, termasuk di dalamnya pembelajaran IPS yang mengintegrasikan kearifan-kearifan budaya lokal masyarakat Bali dapat menjadikan pembelajaran lebih kontekstual dan bermakna (*powerful*) bagi siswa, lebih menyenangkan, dapat menambah wawasan dan meningkatkan literasi sosial budaya siswa (Hermanto, 2012; Lasmawan, 2005; Maryani, 2011; Merdana, 2000; Subagia dan Wiratma; 2008).

Sukadi (2006) dalam disertasinya yang berjudul: “Pendidikan IPS sebagai Rekonstruksi Pengalaman Budaya berbasis Idiologi *Tri Hita Karana* pada SMU Negeri 1 Ubud Gianyar Bali”. menyimpulkan bahwa adanya pandangan dan keyakinan yang kuat dari responden untuk tetap menjadikan *Tri Hita Karana* sebagai *core values* masyarakat Bali yang berlandaskan pada nilai-nilai Agama

Hindu sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan program pendidikan di SMU Negeri 1 Ubud Gianyar-Bali. Sayangnya, penelitian penelitian yang dilakukan Sukadi (2006) hanya melibatkan subjek sasaran yang homogen pada sekolah yang keseluruhan sivitasnya beragama Hindu, sehingga belum dapat menjelaskan tentang bagaimana penerapan nilai-nilai *Tri Hita Karana* dalam komunitas yang lebih heterogen. Ini menunjukkan masih pentingnya dilakukan penelitian dalam skop yang lebih luas dengan kajian yang lebih komprehensif. Penelitian yang penulis lakukan ini dimaksudkan untuk melakukan kajian pada subjek sasaran yang lebih *heterogen* dilihat dari latar belakang sosial ekonomi, budaya, dan agama, yang lebih mencerminkan suasana kehidupan multikultur, dengan substansi dan subjek sasaran yang juga berbeda. Dengan asumsi bahwa, sekolah-sekolah di Bali ke depan akan semakin mengarah ke tatanan kehidupan yang semakin *heterogen* dan semakin kompleks sebagai dampak dari perkembangan pariwisata di era globalisasi ini. Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pendidikan budaya dan karakter bangsa, yakni: membangun tatanan kehidupan bangsa yang ber-Bhineka Tunggal Ika.

Dengan pengkajian permasalahan seperti ini, diharapkan dapat digambarkan bagaimana pengaruh konteks sosial budaya masyarakat Bali dalam lingkup kehidupan masyarakat lokal, nasional, dan global dalam membangun visi dan misi serta pelaksanaan program sekolah, termasuk tentunya Pendidikan IPS di SMP Negeri 1 Singaraja. Tujuan yang terakhir dalam rangka rekonstruksi sosial dalam pendidikan ini dinilai amat urgen dan mendesak seiring dengan perubahan paradigma pendidikan di Indonesia yang berorientasi pada pendidikan berbasis masyarakat luas (*broad-based education*). Harapan ini menekankan perlunya materi-materi pendidikan berbagai kecakapan hidup (*life skills*) diberdayakan kepada generasi muda agar mereka tidak tercabut dari akar kehidupan sosial budaya mereka sendiri (Suryadi, 2002).

Melalui penelitian ini diharapkan terungkap dan ditemukan jawaban mengapa dan bagaimana praktik pendidikan di Bali umumnya, dan khususnya pendidikan IPS memiliki keunikan yang membedakannya dengan praktik pendidikan pada daerah lain di Indonesia. Diharapkan juga melalui penelitian ini dapat ditemukan pengalaman terbaik (*best practices*) dalam rangka menemukan suatu model pendekatan yang efektif dan bermakna sebagai model alternatif dalam pelaksanaan dan pengembangan program pendidikan budaya dan karakter bangsa untuk dapat dikembangkan di sekolah. Untuk mengungkap berbagai fenomena di atas, dalam penelitian ini digunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan menggunakan studi etnografi pendidikan (Creswell, 1988). Pendekatan penelitian ini dipilih agar dapat mengungkap secara lebih mendalam dan komprehensif secara alamiah atau *natural* berbagai hal yang terjadi di SMP Negeri 1 Singaraja, yang berlokasi di Kabupaten Buleleng-Provinsi Bali.

B. Identifikasi Masalah Penelitian

Untuk melihat bagaimana pendidikan budaya dan karakter bangsa diimplementasikan di sekolah, perlu diidentifikasi masalah-masalah yang berkaitan dengan konteks sosial budaya masyarakat, nilai-nilai yang melingkupi sekolah dan harapan-harapan masyarakat pada tujuan-tujuan ideal pendidikan sekolah, bagaimana harapan-harapan itu memberi corak pada pengembangan program dan praktik pendidikan sekolah, serta hasil-hasil atau *output* program pendidikan yang ditimbulkannya. Oleh karena itulah dalam identifikasi masalah ini dikaji hubungan ketiga *setting* penelitian ini. *Pertama*, akan dikaji terlebih dahulu latar konteks sosial budaya masyarakat yang turut mewarnai iklim pendidikan sekolah serta harapan masyarakat Bali dalam rangka “*Ajeng Bali*”; *kedua*, pembudayaan nilai-nilai karakter bangsa dalam rangka membangun generasi muda Bali modern berkarakter kebangsaan Indonesia; *ketiga*, pengembangan program pendidikan budaya dan karakter bangsa melalui pembelajaran IPS.

1. Latar konteks sosial budaya dan harapan-harapan ideal masyarakat yang turut mewarnai iklim pendidikan sekolah

Suasana kehidupan sekolah sangat dipengaruhi oleh konteks lingkungan sosial budaya masyarakat. Oleh karena itu, sekolah dalam membangun budaya dan menciptakan suasana sekolah tentulah tidak bisa lepas dari konteks sosial budaya masyarakatnya. Dengan kata lain, pendidikan sekolah tidak bisa melepaskan diri dari struktur sosial dan sistem budaya masyarakatnya. Sekolah, dengan dinamika kebudayaannya, haruslah menjadi bagian yang integral dari masyarakat dan budaya Bali. Mengakomodasi pemikiran bahwa pendidikan sebagai proses budaya, maka pendidikan sekolah, termasuk Pendidikan IPS juga tidak dapat dilepaskan dari fenomena budaya yang terjadi dalam proses pendidikan di sekolah atau di kelas. Dengan demikian, pendidikan sekolah tentunya haruslah mencerminkan struktur sosial dan budaya masyarakat.

Di sini pulalah pentingnya nilai-nilai kearifan budaya lokal masyarakat dan ideologi orang Bali (*Tri Hita Karana*) dalam menanamkan kesadaran kepada setiap anggota masyarakat, termasuk generasi mudanya, bagaimana mereka memandang dunianya, kehidupan sosialnya, kehidupan budayanya, dan bahkan kehidupan dunia religi mereka sebagai suatu sistem. Ideologi dengan demikian, memiliki pula fungsi edukasi dalam rangka integrasi dan pemeliharaan sistem sosial dan budaya dengan menyediakan seperangkat norma dan nilai-nilai yang menjadi dasar motivasi untuk tindakan sosial (lihat Nelson, 1991: 334-335). Sejalan dengan pemikiran tersebut, pada skala kepentingan nasional yang lebih besar ada harapan masyarakat pula bahwa pendidikan juga mampu memajukan kebudayaan nasional dan membentuk rasa identitas budaya nasional kepada generasi muda. Ini tidak berarti bahwa, bagi masyarakat Bali, generasi muda harus kehilangan identitas kebudayaan aslinya (budaya Bali). Tumbuh dan kembangnya kebudayaan nasional bagi masyarakat bangsa Indonesia tidaklah harus diartikan matinya kebudayaan lokal atau daerah. Hal ini karena dalam konteks kebudayaan nasional, kebudayaan daerah justeru menjadi akar kekayaan kebudayaan nasional.

Kebudayaan nasional bahkan dapat didefinisikan sebagai konfigurasi integratif puncak-puncak kebudayaan daerah yang memiliki relevansi pada kepentingan kemajuan bangsa, peradaban, serta persatuan dan kesatuan bangsa (Budhisantoso, 1993; Soebadio, 1993).

Masalahnya justeru sering terletak pada proses pendidikan di sekolah bagaimana hubungan kebudayaan daerah dan nasional dikonsepsikan, diletakkan statusnya pada peran dan fungsi masing-masing, serta diciptakan dalam pencapaian tujuan-tujuan pendidikan di sekolah. Di sinilah sesungguhnya awal munculnya masalah dalam menempatkan hubungan-hubungan ideologi, hegemoni, dan kebudayaan. Ada indikasi bahwa program pendidikan di sekolah membonceng politik ideologi nasional dan memegang kendali hegemoni, dengan dalih wacana kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan daerah, telah memberikan kesadaran palsu yang justru makin menjauhkan masyarakat, khususnya generasi muda, dari akar kebudayaan daerahnya (Abdullah, 1999; Widja, 2001). Masalahnya bahkan menjadi lebih pelik lagi, karena baik kebudayaan daerah maupun kebudayaan nasional yang diharapkan mampu membentuk identitas etnik dan identitas nasional, karena perseteruannya dalam dominasi hegemoni ideologi nasional, keduanya justeru makin terhimpit oleh besarnya pengaruh kebudayaan global yang bercirikan kebudayaan komtemporer. Diawali oleh berkembangnya pengaruh kebudayaan modern yang membonceng kepentingan hegemoni kebudayaan kapitalis yang dibawa oleh dunia pendidikan barat untuk diterapkan di Indonesia, dunia pendidikan di Indonesia, termasuk di Bali, kini ternyata makin tidak mampu menciptakan kesinambungan dan makin memperbesar diskontinuitas antara kebudayaan daerah, nasional, dan kebudayaan global. Pendidikan di Indonesia dalam hegemoni wacana kebudayaan global dinilai oleh beberapa kalangan telah menimbulkan alienasi yang menyebabkan generasi muda Indonesia makin kehilangan jati diri etnik dan kebangsaannya, lebih-lebih lagi dengan makin menurunnya secara relatif kualitas pendidikan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

Keempat level pembentukan identitas dalam kerangka lingkungan kebudayaannya masing-masing, walau tidak dapat dipisah-pisahkan dalam implementasinya, disadari betul menimbulkan masalah-masalah yang kompleks dalam dinamika fenomena kebudayaan yang dikembangkan dalam proses pendidikan di sekolah pada umumnya dan dalam pelaksanaan program Pendidikan IPS pada khususnya. Kompleksitas masalah tersebut disebabkan oleh (1) belum dapat ditemukan kesesuaian ideologis yang mendasari upaya program pendidikan dalam mencapai harapan-harapan masyarakat seperti di atas, dan (2) harapan-harapan di atas dalam kepentingan aplikasi pengembangan identitas kebudayaan masing-masing memiliki potensi konflik yang besar. Dilihat dari sudut kepentingan masyarakat Bali dalam rangka pembentukan manusia berwatak Bali, maka pendidikan haruslah mampu mengupayakan terjadinya pelestarian kehidupan masyarakat dengan sistem sosial dan budaya Balinya yang berlandaskan nilai-nilai Agama Hindu (Dube, 1980; Widja, 1993). Ini tentu tidak berarti bahwa masyarakat harus mengalami stagnasi dalam kehidupan sosial dan budayanya, karena itu memang tidak mungkin. Sekolah dengan demikian, harus dapat berperan sebagai proses budaya.

2. Pendidikan budaya dan karakter bangsa dalam rangka membangun generasi muda Bali modern berkarakter kebangsaan Indonesia

Mengakomodasi pemikiran bahwa pendidikan sebagai proses budaya, maka pendidikan tidak dapat dilepaskan dari fenomena budaya yang terjadi dalam proses pendidikan di sekolah atau di kelas. Oleh karena itu, pendidikan sekolah tentunya haruslah mencerminkan struktur sosial dan budaya masyarakat. Dengan kata lain, pendidikan sekolah tidak bisa melepaskan diri dari struktur sosial dan sistem budaya masyarakat yang melingkupinya. Sekolah dengan dinamika kebudayaannya haruslah menjadi bagian yang integral dari masyarakat. Dengan begitu, sekolah dapat menyiapkan generasi muda untuk mengambil alih peran-peran dan fungsi-fungsi sosialnya di dalam struktur masyarakat. Yang lebih penting kemudian adalah bagaimana pendidikan sekolah mampu melakukan

sosialisasi dan internalisasi serta mengembangkan secara kritis dan reflektif nilai-nilai sosial dan budaya yang fundamental kepada generasi muda, sehingga tidak saja masyarakat dapat menyerahkan tongkat estafet kebudayaannya kepada generasi muda, tetapi generasi muda sendiri memiliki kemampuan dalam melestarikan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat (Redfield, 1963:13; Spindler, 1974:302).

Menyadari adanya fenomena budaya ini, dalam konteks pelaksanaan program pendidikan, idealnya menjadi harapan masyarakat bahwa terbentuknya nilai-nilai kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia pada peserta didik yang bersumber dari nilai-nilai luhur kearifan lokal yang masih dijunjung tinggi oleh masyarakat, nilai-nilai Pancasila, dan nilai-nilai masyarakat global yang dinamis yang bersesuaian dengan nilai-nilai lokal dan nilai-nilai Pancasila. Keseimbangan pembentukan kecerdasan dan nilai-nilai yang bersifat multi-dimensional, komprehensif, utuh, dan sinergis inilah menjadi harapan pencapaian tujuan pendidikan karakter di Indonesia (Kemendiknas, 2010).

Kehidupan individu dan warga masyarakat yang demikian inilah yang menjadi harapan dan cita-cita ideal yang ingin diwujudkan melalui pelaksanaan program pendidikan budaya dan karakter bangsa. Hal ini senada dengan pandangan Fromm (1955:362), dalam karya besarnya *The sane society*, yang mengemukakan bahwa masyarakat yang ideal adalah masyarakat:

“..... di mana manusia berhubungan satu sama lain dengan penuh cinta, di mana ia berakar dalam ikatan-ikatan persaudaraan dan solidaritas, suatu masyarakat yang memberinya kemungkinan-kemungkinan untuk mengatasi kodratnya dengan menciptakan, bukan membinasakan, di mana setiap orang mencapai pengertian tentang diri dengan mengalami dirinya sebagai subyek dari kemampuan-kemampuannya bukan dengan komformitas, di mana terdapat suatu sistem orientasi dan devosi tanpa orang perlu mengubah kenyataan dan menuja berhala”.

Masyarakat seperti ini pada setiap orang dan kelompok akan memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi manusia yang sepenuhnya. Anggota masyarakat yang demikian tidak akan ada rasa kesepian, isolasi, serta keputusasaan. Jika cita-cita ideal Fromm ini dikaitkan dengan pentingnya

pendidikan budaya dan karakter bangsa dalam rangka integrasi bangsa, hal ini sangat relevan karena dapat mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan individu dalam mengembangkan dirinya di satu sisi, dan di lain sisi ia mengingatkan diri sebagai bangsa yang dilandasi oleh ikatan-ikatan persaudaraan serta solidaritasnya. Masyarakat yang demikian itu terhindar dari adanya konflik kepentingan masyarakat lokal, nasional, dan global. Dalam konteks kehidupan masyarakat Bali, adalah terwujudnya kehidupan masyarakat dan generasi muda Bali modern yang berkater kebangsaan Indonesia, yang dicirikan dengan kemampuan: *“think globally, act locally, respect to the nasionalism”*.

Untuk mewujudkan tujuan program pendidikan budaya dan karakter bangsa, sekolah harus menjadi lingkungan dan komunitas di mana dapat dikembangkan kultur berkarakter. Sekolah harus menjadi media pembudayaan nilai-nilai budaya yang memungkinkan terjadinya proses karakterisasi yang kuat. Asumsi dasar pentingnya sekolah membangun kultur berkarakter, karena sekolah menjadi media utama lintasan belajar anak. Sejauh mana anak menjadi seorang yang berkarakter kuat akan sangat ditentukan oleh pengalaman dari lintasan yang dilaluinya di sekolah bersama dengan seluruh sivitas sekolah, yakni: kepala sekolah, guru, pegawai, sesama siswa, termasuk dengan orang tua dan lingkungan sekolah itu (Colby, 2008:391; Lickona, 1996:63; Klann, 2007:18-19).

Dalam proses ini, sekolah memiliki peran dalam pembentukan karakter, melalui: (1) Pengembangan visi sekolah; (2) Regulasi dan tata tertib sekolah sebagai instrument dalam karakterisasi nilai-nilai; (3) Pimpinan sekolah dan guru sebagai teladan; (4) Orang tua sebagai mitra pembentukan karakter; dan (5) Memanfaatkan simbol-simbol, seperti lambang dan atribut sekolah, simbol-simbol pemerintahan dan kenegaraan, simbol-simbol keagamaan, simbol budaya. Terry Lovat (2007:51), menggambarkan perubahan komprehensif sekolah dengan mengedepankan empat dimensi utama, yaitu: kejelasan sekolah mengenai visi, pengaruh konteks dari lingkungan strategis sekolah, peranan kepemimpinan dan akuntabilitas sekolah itu sendiri. Lebih lanjut, Terry Lovat (2007:53) menjelaskan

bahwa internasialisasi nilai dapat dilakukan dengan berperilaku secara etis (*behaving ethically*), membangun komunitas dalam rangka penguatan hubungan (*strengthening relationship*), peningkatan aktualisasi diri, semangat ilmiah tanpa henti mencari pengetahuan baru (*seeking knowledge*), dan meningkatkan responsibilitas global sebagai penghargaan atas berbagai hak asasi manusia.

3. Pendidikan budaya dan karakter bangsa melalui pembelajaran IPS

Dalam wacana historis-akademis, terutama jika dilihat dari visi, misi, dan strateginya, Pendidikan IPS pada hakikatnya bermuatan pengembangan karakter, bertujuan untuk mengembangkan warga negara yang baik sesuai dengan nilai dan norma yang telah diterima secara baku dalam suatu negara yang ditandai oleh kemampuannya dalam melihat dan mengatasi masalah-masalah sosial dan personal dengan menggunakan metode sesuai dengan cara kerja para ilmuwan sosial, dengan ciri pokoknya mampu mengambil keputusan (Barr dkk., 1978; Jarolimek, 1986; Hunt dan Metcalf, 1955; Martorella, 1996).

Dalam konteks pendidikan di Indonesia, Pendidikan IPS adalah wahana pendidikan dalam rangka *nation and character building* yang memungkinkan setiap warga negara memiliki kecakapan-kecakapan dan kompetensi kewarganegaraan yang utuh dan *powerful*; menjadi warga negara yang baik dan cerdas (*to be smart and good citizenship*) yang meliputi: *civic knowledge, civic disposition, civic skills, civic confidence, civic commitment, civic competence*; yang secara utuh dapat digunakan untuk mewujudkan budaya kewarganegaraan (*civic culture*) yang bermoral dan bermartabat (*humanis, holistik, dan religius*) (Wahab, 2007; Somantri, 2001; Budimansyah dan Sapriya, 2012).

Sebagai wahana pendidikan karakter bangsa, maka Pendidikan IPS tidaklah dapat lepas dari hakikat program dan proses pendidikan pada umumnya. Di sini Pendidikan IPS tidak dapat dilepaskan dari hubungan antara pendidikan dengan aktivitas sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ketika mereka bersinergi maka mau tidak mau membawa konsekuensi pada perlunya Pendidikan IPS memiliki landasan filosofis yang jelas yang

menjelaskan pertautan program pendidikan dengan aktivitas masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan landasan filosofis yang jelas itulah nantinya visi, misi, tujuan, program, konten, pembelajaran, dan penilaian Pendidikan IPS itu diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan IPS sebagai wahana pendidikan karakter tersebut (CCE, 2002; Djahiri, 1996, 2006; Somantri, 1996; Winataputra, 2010).

Maka munculnya kebutuhan, harapan, dan keinginan-keinginan untuk melakukan pembaharuan pada pelaksanaan sistem pendidikan nasional tampaknya tidak dapat ditawar-tawar. Adanya gagasan pembaharuan sistem pendidikan nasional yang berorientasi pada *broad-based education*, pengembangan materi pendidikan *life skills*, pengembangan kurikulum berbasis kompetensi, pengembangan pengelolaan dan peningkatan mutu pendidikan berbasis sekolah (*school-based management*) adalah bukti-bukti munculnya kebutuhan-kebutuhan untuk reformasi pendidikan di Indonesia (Depdiknas, 2002, 2003, 2004, 2006; Suryadi, 2002).

Munculnya gagasan-gagasan seperti di atas tampaknya relevan dan sejalan dengan orientasi filosofi pendidikan rekonstruksi sosial seperti yang berkembang di Amerika dan Jepang sebagai telah dijelaskan di atas. Ini membuktikan bahwa program pendidikan sesungguhnya tidak bisa dipisahkan dari kebutuhan-kebutuhan pragmatis pengembangan struktur sosial dan sistem kebudayaan dalam masyarakat yang melingkupi dalam rangka pembentukan jati diri kemasyarakatan atau kebangsaan (Van Scotter, et al., 1985; O'neil, 2001). Soebadio (1993) menjelaskan bahwa bahkan UNESCO, sebagai badan PBB yang bergerak di bidang sosial budaya, hingga kini masih memiliki komitmen yang kuat untuk meningkatkan dan memajukan *cultural identity* melalui pengembangan program pendidikan yang relevan di negara-negara bekas jajahan.

Pendidikan IPS sebagai bagian integral dari program-program pendidikan sekolah, sejalan dengan pembaharuan-pembaharuan program pendidikan yang berorientasi pada filsafat pendidikan rekonstruksi sosial ini tanpa mengabaikan

keunggulan-keunggulan filsafat pendidikan esensialisme, telah pula melakukan pembaharuan agar lebih sejalan dengan cita-cita perubahan sosial dan budaya masyarakat. Dapat diketahui bahwa penerapan pendidikan budaya lokal, pendidikan multikultural, dan pendidikan perspektif global dalam PIPS ternyata bukanlah harapan masyarakat Indonesia semata. Di negara-negara maju seperti Amerika, Jepang, Australia, negara-negara Eropa, bahkan di negara-negara Asia lainnya ketiga jenis pendidikan ini ternyata telah diintegrasikan dalam Pendidikan IPS (*Social Studies, Social Education, Social Science Education, Social Science and Environment*) mereka (Banks, 1981, 1991; Nelson, 1991; Stopsky and Lee, 1994; Waterworth, 1999).

Sayangnya, pelaksanaan IPS sebagai suatu program pendidikan di Indonesia belumlah mencerminkan harapan-harapan seperti telah digambarkan di atas. Jika diterima asumsi bahwa program Pendidikan IPS adalah juga sebuah proses budaya, maka ia tidaklah dapat dilepaskan pula dari proses rekonstruksi pengalaman budaya pendukungnya (guru, murid, kepala sekolah, pejabat berwenang di atasnya, pegawai, orang tua murid dan masyarakat lingkungannya). Dan ini tentunya membutuhkan upaya reformulasi jati diri dan reorientasi serta rekonstruksi tujuan-tujuan Pendidikan IPS (Somantri, 2001).

Jika cita-cita atau harapan dalam rangka pembentukan generasi muda modern berwatak Bali seperti dijelaskan di atas hendak diwujudkan melalui kontribusi dan peran Pendidikan IPS, maka tidaklah naif untuk mereformulasi dan mereorientasi jati diri dan tujuan-tujuan Pendidikan IPS sebagaimana diharapkan. Karena itu, tampaknya perlu untuk mengkaji pelaksanaan program Pendidikan IPS di Indonesia ini sebagai suatu pendekatan budaya. Ada beberapa kelemahan mendasar yang terjadi dalam pelaksanaan program Pendidikan IPS di sekolah selama ini jika diharapkan sebagai suatu proses budaya dalam rangka pencapaian cita-cita perubahan sosial budaya dalam masyarakat.

Pertama, program Pendidikan IPS selama ini tampaknya kurang memiliki landasan filsafat ilmu dan filosofis pendidikan yang jelas, melainkan lebih

dianggap sebagai *socio-political institution* yang dapat dijadikan kendaraan bagi negara dalam menanamkan kekuasaan ideologis dan politik nasionalismenya kepada warga negara (Winataputra, 2001). Praktik program Pendidikan IPS juga kurang memiliki landasan-landasan sosial budaya yang jelas dan kokoh karena lebih penting menonjolkan aspek pengajaran konsep-konsep dasar ilmu sosial yang diseleksi, diorganisasikan, serta disajikan secara ilmiah dan psikologis. Pelaksanaan program Pendidikan IPS juga cenderung lepas dari konteks kemasyarakatan dan lebih menekankan penguasaan konsep-konsep keilmuan oleh siswa (Cornbleth, 1991).

Kedua, dalam konteks pengembangan kebudayaan daerah/lokal, nasional, dan global, pengembangan materi Pendidikan IPS di sekolah cenderung lebih berorientasi pada materi ruang lingkup nasional dan kurang proporsional dalam menyajikan materi-materi muatan lokal/kebudayaan daerah dan kebudayaan global atau perspektif global.

Ketiga, Pendidikan IPS lebih menekankan misi sosio-paedagogis dan mengabaikan misi sosio-akademis dan sosio-kulturalnya yang memungkinkan pebelajar dapat berpartisipasi sosial secara aktif dengan cerdas dan bertanggung jawab baik di tingkat lokal, nasional, maupun global (Cogan, et al., 1997). Pendidikan IPS lebih berorientasi pada pandangan fungsionalisme yang statis dan konservatif sehingga mengabaikan segi-segi demokrasi dan pengembangan berpikir kritis dan kreatif (Mulder, 2003).

Keempat, Pendidikan IPS dalam pembelajarannya di kelas lebih menekankan pendekatan ekspositori dan kurang memberi arti pada makna pendidikan demokrasi dengan pendekatan-pendekatan belajar secara kelompok kooperatif dan dialog interaktifnya dengan memanfaatkan pengalaman belajar dan konsep-konsep awal siswa (Wahab, 2000).

Kelima, Pendidikan IPS di sekolah kurang mengembangkan kapabilitas belajar yang utuh dan autentik dalam seluruh bentuk kecakapan hidup potensial (personal, sosial, intelektual, akademis, dan vokasional) yang dapat

dikembangkan pada diri siswa melainkan hanya menekankan kemampuan pemahaman tingkat rendah dan kurang *powerful* (NCSS, 2000).

Berbagai kelemahan dalam penerapan program Pendidikan IPS di atas, tentu memerlukan upaya rekonstruksi dari berbagai komponen pendidikan dengan melakukan reformulasi jati diri dan reorientasi tujuan-tujuan Pendidikan IPS agar lebih sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dengan pemenuhan standar lokal, nasional, dan global. Meminjam konsep Giroux (1981), dalam mengkaji proses pendidikan di sekolah sebagai proses budaya, perlu dianalisis hubungan-hubungan antara ideologi, kebudayaan, dan proses pendidikan di sekolah itu sendiri. Stopsky dan Lee (1994:1) mengatakan bahwa PIPS bukanlah hanya pendidikan ilmu-ilmu sosial atau pelajaran sejarah kehidupan manusia masa lalu saja, tetapi juga sebagai sarana untuk membawa manusia kepada kehidupan masa depan yang menjanjikan. PIPS melibatkan pengetahuan, sikap, nilai-nilai, dan keterampilan yang memungkinkan siswa berkembang menjadi duta-duta warga negara yang bijaksana, bertanggungjawab dan efektif.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dirumuskan permasalahan pokok penelitian ini, sebagai berikut: “Bagaimana pendidikan budaya dan karakter bangsa yang dipengaruhi konteks sosial budaya dan harapan-harapan ideal masyarakat diimplementasikan di SMP Negeri 1 Singaraja, dan bagaimana implikasi/dampaknya terhadap proses dan hasil belajar siswa?”.

Permasalahan pokok tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam tiga fokus permasalahan, sebagai berikut.

1. Bagaimanakah gambaran latar konteks sosial budaya masyarakat (lokal, nasional, dan global) yang turut mempengaruhi iklim pendidikan di SMP Negeri 1 Singaraja?
2. Bagaimanakah model implementasi pendidikan budaya dan karakter bangsa yang mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat, dan bagaimana

implikasinya terhadap proses dan hasil belajar yang berorientasi pada pembentukan karakter siswa?

3. Bagaimanakah peran Pendidikan IPS sebagai wahana pendidikan budaya dan karakter bangsa, dan bagaimana implikasinya terhadap proses dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS di SMP Negeri 1 Singaraja?

Pada masing-masing fokus permasalahan dikembangkan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang cenderung bersifat fleksibel dan memungkinkan peneliti dapat bergerak dalam mengkaji realitas sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan (Carspecken, 1996). Pertanyaan-pertanyaan penelitian yang relevan diajukan terkait dengan permasalahan pertama, antara lain:

- 1) Bagaimana kondisi geografis dan harapan masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam visi pembangunan Kabupaten Buleleng turut mewarnai praktik pendidikan budaya dan karakter bangsa di SMP Negeri 1 Singaraja?
- 2) Bagaimana upaya sekolah mengakomodasi dan mengintegrasikan pengaruh konteks sosial budaya serta harapan-harapan masyarakat (lokal, nasional, dan global) dan merumuskannya dalam visi, misi, dan tujuan sekolah?
- 3) Nilai-nilai kearifan budaya lokal apa saja yang perlu dilestarikan dan dijadikan sebagai landasan untuk memperkuat pembudayaan nilai-nilai karakter bangsa di SMP Negeri 1 Singaraja?
- 4) Bagaimana dukungan sarana dan prasarana serta sumber daya sekolah (guru, pegawai, dan siswa) terhadap upaya sekolah dalam menciptakan iklim/suasana sekolah yang berorientasi pengembangan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa di SMP Negeri 1 Singaraja?

Pertanyaan-pertanyaan penelitian yang relevan dan perlu diajukan terkait dengan permasalahan kedua, antara lain:

- 1) Bagaimana upaya sekolah melakukan penataan lingkungan sekolah dan kelas untuk memfasilitasi terjadinya proses pembudayaan nilai-nilai karakter bagi siswa di SMP Negeri 1 Singaraja?

- 2) Bagaimana strategi kebijakan pengintegrasian nilai-nilai karakter ke dalam kurikulum sekolah dan dalam praktik-praktik pembelajaran di SMP Negeri 1 Singaraja?
- 3) Bagaimana pengintegrasian nilai-nilai karakter bangsa yang dilakukan melalui program ekstrakurikuler, OSIS dan pengembangan diri di SMP Negeri 1 Singaraja?

Pertanyaan-pertanyaan penelitian yang relevan dan perlu diajukan terkait dengan permasalahan ketiga, lain:

- 1) Bagaimanakah pandangan para pendidik dan siswa tentang status Pendidikan IPS serta upaya apa yang dilakukan dalam mewujudkan tujuan PIPS sebagai pendidikan budaya dan karakter bangsa?
- 2) Bagaimana isi (*content*), model/pendekatan, strategi, metode, dan sumber-sumber fasilitas belajar yang dikembangkan/digunakan para pendidik untuk mencapai tujuan-tujuan pembelajaran IPS sebagai wahana pendidikan budaya dan karakter bangsa?
- 3) Bagaimanakah model penilaian dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS yang berkaitan dengan penguasaan pengetahuan sosial dan sikap siswa sebagaimana yang tercermin dalam nilai raportnya?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi serta rumusan masalah penelitian di atas, maka secara keseluruhan penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang model penyelenggaraan pendidikan budaya dan karakter bangsa serta implikasinya terhadap pencapaian tujuan pendidikan sekolah secara umum, dan tujuan pembelajaran IPS khususnya dalam penguatan nilai-nilai karakter di SMP Negeri 1 Singaraja.

Secara lebih spesifik/khusus tujuan dilakukannya penelitian ini dapat dijabarkan, sebagai berikut.

1. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor eksternal, yang meliputi latar konteks sosial budaya masyarakat yang melingkupi sekolah dan nilai-

- nilai/ideologi serta harapan masyarakat yang turut mempengaruhi iklim pendidikan di SMP Negeri 1 Singaraja.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor internal dan dukungan sarana dan prasarana serta sumber daya sekolah dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan, serta program-program pendidikan budaya dan karakter bangsa di SMP Negeri 1 Singaraja.
 3. Mengidentifikasi nilai-nilai kearifan budaya lokal masyarakat Bali secara umum, dan masyarakat Buleleng khususnya yang perlu dilestarikan dan dijadikan sebagai landasan untuk memperkuat pembudayaan nilai-nilai karakter bangsa di SMP Negeri 1 Singaraja.
 4. Memperoleh fakta dan data tentang model penataan lingkungan sekolah dan kelas yang dapat dijadikan sebagai media pembudayaan nilai-nilai karakter bangsa bagi sivitas sekolah, khususnya siswa di SMP Negeri 1 Singaraja.
 5. Menganalisis model pengintegrasian nilai-nilai budaya dan karakter bangsa dalam kurikulum sekolah, dan praktik-praktik pembiasaan/pembudayaannya yang dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler dan program OSIS di SMP Negeri 1 Singaraja.
 6. Menganalisis pandangan para pendidik dan siswa tentang Pendidikan IPS, dan menjelaskan dasar-dasar filosofis (ideologis) dan sosiobudaya yang melandasi persepsi dan cara para pendidik memformulasikan hakikat pembelajaran IPS sebagai program pendidikan budaya dan karakter bangsa.
 7. Memperoleh gambaran tentang isi (*content*) dan sumber-sumber belajar yang dikembangkan/digunakan para pendidik untuk mencapai tujuan-tujuan pembelajaran IPS sebagai wahana pendidikan budaya dan karakter bangsa.
 8. Memperoleh gambaran tentang pendekatan/metode pembelajara yang dikembangkan para pendidik untuk mencapai tujuan-tujuan pembelajaran IPS sebagai wahana pendidikan budaya dan karakter bangsa.

9. Memperoleh gambaran tentang model penilaian yang dikembangkan para pendidik untuk mencapai tujuan-tujuan pembelajaran IPS sebagai wahana pendidikan budaya dan karakter bangsa.
10. Mengalisis implikasi/dampak yang ditimbulkan dari penerapan/ pengembangan model pendekatan pendidikan budaya dan karakter bangsa di SMP Negeri 1 Singaraja.
11. Memverifikasi model/pendekatan pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa di SMP Negeri 1 Singaraja, yang diharapkan dapat dijadikan sebagai model alternatif dalam pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa sekolah lain di Kabupaten Buleleng dan di Bali sebagai implikasi dari temuan-temuan di atas dengan merekonstruksi pengalaman belajar yang bersumber dari nilai-nilai lokal, nilai-nilai nasional, dan global.

E. Manfaat/Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan hasil yang dapat bermanfaat baik secara praktis maupun teoritis sebagai berikut.

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengambil kebijakan dan para pendidik di Bali untuk mengembangkan kurikulum dan program pembelajaran yang berbasis konteks sosial budaya masyarakat, baik lokal, nasional, maupun global sejalan dengan kebutuhan dan proses perubahan sosial budaya masyarakat Bali.
2. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan tentang model/pendekatan dalam pengembangan program pendidikan budaya dan karakter bangsa di sekolah yang tidak bisa dipisahkan dari pengaruh kepentingan dan perubahan sosial budaya masyarakat pendukungnya.
3. Penelitian ini secara teoritis juga diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan baru dalam mengembangkan pembelajaran IPS di Indonesia, yang selama ini cenderung hanya didefinisikan, dimaknai, diimplementasikan,

dan terfokus sebagai proses pentransferan ilmu-ilmu sosial dan humaniora yang disederhanakan di sekolah untuk tujuan-tujuan pengajaran.

4. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti lanjut dalam bidang pendidikan, dan khususnya Pendidikan IPS untuk memberikan masukan data, temuan konsep, proposi, dan generalisasi yang dapat digunakan sebagai refleksi awal dalam menemukan masalah-masalah baru dalam kaitannya dengan hubungan antara konteks sosial budaya masyarakat dengan pelaksanaan program pendidikan sekolah, dan khususnya Pendidikan IPS di Indonesia dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan-tujuannya mengembangkan kemampuan *think globally, act locally, and respect to the nationalism*.

F. Struktur Organisasi Disertasi

Secara keseluruhan disertasi ini terdiri dari 5 (lima) bab. Masing-masing bab memuat hal-hal, sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan, yang menyajikan uraian tentang latar belakang penelitian, identifikasi masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat/signifikansi penelitian, dan struktur organisasi disertasi.

Bab II Kajian Pustaka, yang memuat kajian konseptual dan teoritis tentang: (1) Kajian tentang Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa; (2) Kajian tentang Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa berbasis Kearifan Lokal; dan (3) Pendidikan IPS sebagai Wahana Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa. Pada bagian ini juga disajikan hasil-hasil penelitian sebelumnya, dan kerangka model pengembangan penelitian ini.

Bab III Metode Penelitian, yang memuat lokasi dan subjek penelitian, desain penelitian dan prosedur penelitian, metode pengumpulan data, jenis data penelitian yang dikumpulkan, metode pengumpulan data yang digunakan, dan teknik analisis data penelitian.

Bab IV, memuat hasil penelitian dan pembahasan dari ketiga fokus permasalahan yang dikaji, meliputi: (1) Konteks sosial budaya masyarakat, termasuk ideologi masyarakat yang merupakan rekonstruksi pengalaman budaya

para civitas sekolah, turut mewarnai praktik proses pendidikan budaya dan karakter bangsa di SMP Negeri 1 Singaraja; (2) Model/pendekatan pembiasaan/pembudayaan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang dilakukan di SMP Negeri Singaraja, dan bagaimana implikasinya terhadap proses dan hasil belajar siswa; dan (3) Pendidikan budaya dan karakter bangsa yang diintegrasikan dalam pembelajaran IPS, dan bagaimana implikasinya terhadap proses dan hasil belajar siswa di SMP Negeri 1 Singaraja.

Bab V, memuat dua hal pokok, yaitu: kesimpulan dan rekomendasi yang diajukan untuk ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait, antara lain: para pengambil kebijakan dan praktisi pendidikan serta peneliti selanjutnya.